

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
KELAS II A MUARA PADANG**

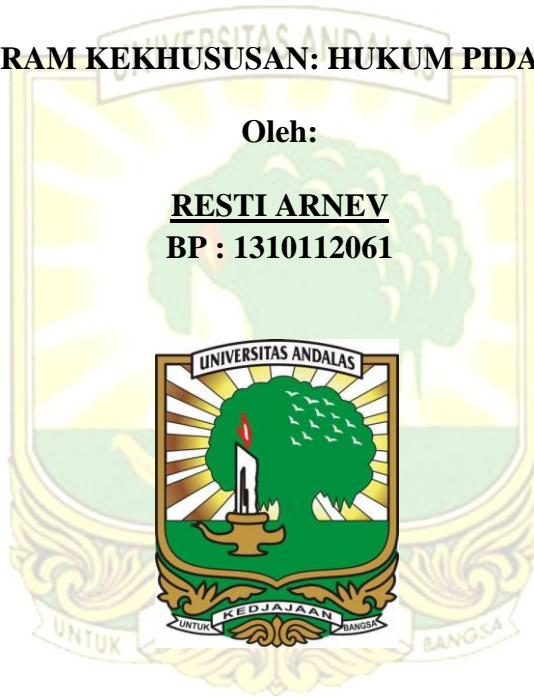
SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (IV)

Oleh:

RESTI ARNEV
BP : 1310112061



Pembimbing:

yoserwan S.H., M.H., LL.M
Iwan Kurniawan, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2018

**PELAKSANAAN PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA
PENYANDANG DISABILITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

KELAS II A MUARA PADANG

(Resti Arnev, 1310112061, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 60 halaman)

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan institusi terakhir dalam Sistem Peradilan Pidana yang mempunyai peran penting untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana. Adapun tujuan dari pembinaan ini agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan pidana. Semua narapidana mendapatkan hak yang sama, hal ini juga berlaku terhadap narapidana penyandang disabilitas. Narapidana penyandang disabilitas mempunyai keterbatasan fisik sehingga memiliki hambatan dalam pelaksanaan pembinaan. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi permasalahan: (1) Bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Padang? (2) Apa kendala dan solusi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Padang dalam pelaksanaan pembinaan narapidana penyandang disabilitas? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (empiris), dengan melakukan wawancara, studi dokumen dan pengamatan, dan dianalisis secara kualitatif, dengan menjabarkannya dalam penulisan deskriptif. Pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana penyandang disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Padang, yaitu belum terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai hak penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari tidak adanya perlakuan khusus dalam pelaksanaan pembinaan. Adapun kendala dan upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Padang, yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya pemahaman dan pengetahuan petugas, kapasitas lembaga pemasyarakatan, kurangnya komunikasi antara petugas lapas dengan dinas sosial. Dari beberapa kendala tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muara Padang belum ada terlaksana upaya penanggulangannya.